

ABSTRAK

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putera putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain halnya lagi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama.

Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dikuatkan dengan wawancara.

Hasil penelitian Sebagai warga negara Indonesia kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga lainnya..Perlindungan yang diberikan pada Undang-Undang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang cacat. Terkait dengan sarana dan prasarana di UTM untuk penyandang disabilitas Ada, namun masih kurang memadai diantaranya yaitu ram (tangga yang tidak beranak), lift dan toilet. UTM sampai saat ini masih belum ada yang mendaftar terkait mahasiswa disabilitas. Mungkin dengan hal tersebut untuk sarana dan prasarana disabilitas belum dilengkapi.

Kata Kunci : Hak Konstitusional-Disabilitas-Pendidikan

ABSTRACT

Based on the goal of the Indonesian people who want to promote the general welfare and educate the life of the nation, it has become a right for the son of the Indonesian princess to receive education and enjoy the prosperity of the nation. However, this fact was not able to be felt by a small number of Indonesian citizens. By reason of having a disability, both physical and mental. Children and parents who are basically Indonesian citizens should be able to enjoy all forms of public facilities or services that have been provided, be it education, health, security services and so on. Therefore, this research is conducted to describe matters relating to persons with disabilities who have the same rights.

The method of research used the type of normative legal research is legal research conducted by examining the literature and reinforced by interview. As a citizen of Indonesia the status, rights, obligations and roles of persons with disabilities are the same as that of other citizens.

The protection afforded by the Law gives legal protection to the positions, rights, obligations and roles of persons with disabilities. Related to facilities and infrastructure in UTM for persons with disabilities There are, but still inadequate among them are ram (ladder no child), elevator and toilet. UTM until now still no one to register related to student disability. Perhaps with that for the facilities and infrastructure disabilitas not yet equipped.

Keywords: Constitutional Rights-Disability-Education

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Manfaat	8
1.4.1. Manfaat teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Keaslian	10
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	11
1.6.3. Bahan Hukum	11
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	12

BAB II

KONSEP HAK KONSTITUSIONAL, PENYANDANG DISABILITAS DAN PENDIDIKAN

2.1. Konsep Negara Hukum	13
2.1.1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	20
2.1.2. HAM dan Hak Konstitusional	26
2.2. Konsep Penyandang Disabilitas	30
2.2.1. Pengertian Penyandang Disabilitas	30
2.2.2. Jenis-Jenis Disabilitas	32
2.3. Hak Atas Pendidikan	34

BAB III

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.

3.1.Jaminan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Indonesia	37
3.1.1. Undang-Undang Dasar 1945	40
3.1.2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas	43
3.1.3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	44
3.1.4. Jaminan Aksebilita Bagi Penyandang Cacat dalam Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas	45
3.2.Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura	51

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan	74
4.2.Saran	75
Daftar Pustaka	76